Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Istilah Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah 21
B. Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, dan Sistem Pemerintahan 24
C. Pemerintahan dengan Sistem Otonomi Daerah 27
D. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia .. 31
E. Prinsip Kedaulatan Rakyat sebagai Dasar Pelaksanaan Otonomi Daerah 37

BAB II : OTONOMI DAERAH DAN FEDERASI

A. Latar Belakang Pelaksanaan Otonomi Daerah 43
B. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan 45
C. Visi dan Konsep Dasar Otonomi Daerah 48
D. Federalisme-Federasi 52

BAB III : SEJARAH PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

A. Warisan Kolonial 55
B. Masa Pendudukan Jepang 58
C. Masa Kemerdekaan 61

BAB IV : ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
A. Otonomi Daerah 81
B. Desentralisasi 86
C. Dekonsentrasi 88
D. Tugas Pembantuan 89

BAB V : BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif Daerah) 93
B. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Eksekutif Daerah) 104
C. Syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 107
D. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung 110
E. Hubungan antara Legislatif Daerah dengan Eksekutif Daerah 117

BAB VI : PRODUK HUKUM DAERAH SEBAGAI LANDASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Jenis-jenis Produk Hukum Daerah 121
B. Landasan dan Asas Pembentukan Peraturan Daerah .. 127
C. Proses Pembentukan Peraturan Daerah 130
D. Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan Daerah .. 132
E. Fenomena Pemberlakuan Perda Syariat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah 141

BAB VII : HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
A. Hubungan dalam Bidang Kewenangan 147
B. Hubungan dalam Bentuk Pembinaan dan Pengawasan 151
C. Hubungan dalam Bidang Keuangan 156

BAB VIII : REFORMASI KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

A. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas di Daerah 159
B. Redefinisi Reformasi Birokrasi 161
C. Dinamika Reformasi Birokrasi di Indonesia 162
D. Kinerja Birokrasi Pemerintah Daerah 164
E. Peningkatan Kinerja Eksekutif dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah 165
F. *Reinventing Government* sebagai Alternatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 167
G. Faktor-faktor yang Memengaruhi Peningkatan Kinerja Birokrasi di Daerah 171
H. Peran Kontrol Sosial dalam Meningkatkan Kinerja Birokrasi di Daerah 172

BAB IX : PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
A. Paradigma Baru Berpemerintahan 175
B. Hubungan Prinsip *Good Governance* dengan Otonomi Daerah 178
C. Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah melalui *Good Governance* 187

BAB X : MANAJEMEN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
A. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 191
B. Dana Perimbangan 195
C. Prospek Kebijakan Keuangan Daerah pada Era Globalisasi dan Desentralisasi 198

BAB XI : PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
A. Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat di Lingkungan Pemerintahan 205

B. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah 206
C. Asas Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 207
D. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Dekonsentrasi 208
E. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Pembantuan 209

BAB XII : PENINGKATAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH

A. Kebijakan Pemerintah dalam Peningkatan Ekonomi dan Pembangunan 211
B. Prospek Peningkatan Perekonomian Daerah pada Era Globalisasi dan Desentralisasi 213
C. Prinsip-prinsip Pokok dalam Penganggaran dan Manajemen Keuangan Daerah 216
D. Manajemen Pendapatan Asli Daerah 218

BAB XIII : PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

A. Pajak dan Retribusi Darah sebagai Sumber Pendapatan Daerah 221
B. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah 222
C. Ketentuan Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 225
D. Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah 228
E. Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Mendukung Pembiayaan Daerah 229
F. Optimalisasi Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah 231

BAB XIV : PENGEMBANGAN DEMOKRASI DI DAERAH SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN *(WELFARE STATE)*

A. Pengembangan Demokrasi di Daerah 235
B. Peran Partai Politik dalam Pengembangan Demokrasi di Daerah 236
C. Konsep Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia 240
D. Dinamika Budaya Politik di Indonesia 243
E. Perwujudan Demokrasi di Daerah Melalui Pendidikan Politik 246
F. Perimbangan Pembangunan Politik dan Ekonomi 247
G. Perwujudan Negara Kesejahteraan Indonesia dalam Negara Demokrasi 248
H. Peranan Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat 252

BAB XV : PERSOALAN-PERSOALAN YANG DIHADAPI PEMERINTAH DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERUBAH-UBAH

A. Berbagai Masalah dalam Otonomi Daerah 255
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 259
C. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 297

DAFTAR PUSTAKA 417